



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
**UNIT KERJA** : DINAS PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NAWIR TONDAKO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 503583

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 28356 m2/161600 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 28356 m2/161600 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.209.000.000

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. KAPAL LAUT/PERAHU, MITSUBITSU KAPAL IKAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
7. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. KAPAL LAUT/PERAHU, MITSUBITSU KAPAL IKAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 52.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.650.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.000.000.000
Sub Total	Rp.	5.914.650.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.914.650.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.